

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan dalam tiap-tiap bab, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghapusan Pajak Ganda atas SHU yang diatur melalui Konsolidasi Klaster Perpajakan dalam Bab III Pasal 4 ayat (3) huruf i UU No. 6 Tahun 2023 tentang Jo UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menandai perubahan rezim sistem perpajakan di Indonesia yang sebelumnya menganut sistem klasik (*classical system*) menjadi *Integration of Distributed Profit* berbasis sistem pengecualian dividen (*dividend-exclusion system*). Dengan dikecualikannya SHU dari objek pajak berimplikasi pada berkurangnya beban pajak atas SHU bagi orang pribadi (anggota koperasi) dari yang sebelumnya tarif PPh efektif 37,6% (golongan tarif 20%), berkurang sebanyak 15,6%. Sementara tarif PPh efektif untuk golongan 40% berkurang sebanyak 33,2%.
2. Pengaturan Pajak SHU Koperasi pertama kali diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonasi Pajak Dividen 1959. Perppu tersebut mengatur mekanisme pembayaran pajak atas dividen termasuk mencakup pajak bunga dan royalti dengan tarif sebesar 20% dari hasil bruto. Dalam perkembangannya, pemerintah menerbitkan regulasi-regulasi perpajakan sehubungan dengan Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) yang dilakukan pada 1983. PSPN 1983 terdiri atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa dan Pajak Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Melalui pembaharuan tersebut, maka pengaturan pemajakan atas dividen digabungkan dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang kemudian dilakukan perubahan-perubahan hingga terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan.

3. Koperasi berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang rata-rata mengalami peningkatan. Pada 2008, sektor koperasi sebelumnya hanya berkontribusi sebesar 1,11% terhadap PDB. Nasional. Angka ini mengalami kenaikan menyentuh 5.20% kontribusi koperasi pada 2022. Kontribusi yang ditorehkan oleh sektor perkoperasian terhadap PDB Nasional menunjukkan peran serta konsistensi koperasi dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Dengan dihapuskannya Pajak Ganda SHU, Koperasi dapat penyimpanan kembali laba atas pajak sebesar 10% dengan nilai kalkulasi mencapai 559,97-587,76 milyar rupiah di tiap periode 2020-2022. Selain itu, data menunjukkan bahwa melalui penghapusan Pajak Ganda Koperasi pada 2020 berkolerasi terhadap terjadinya pertumbuhan kuantitas sektor usaha berbasis koperasi. Dari 123.048 (2019) koperasi menjadi 127.124 (2020) yang berarti terjadi pertumbuhan sebanyak 4.076 koperasi. Kemudian pada 2021 menjadi 127.468. Berlanjut pada 2022 jumlah koperasi kembali meningkat menjadi 130.354.
4. Ketentuan pelaksanaan terkait Penghapusan Pajak Ganda SHU diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksana UU Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan hasil penelusuran, Pasal 14 hingga Pasal 43 Bagian Ketiga PMK No. 18/PMK.03/2021 hanya menjabarkan terkait teknis dan syarat pengecualian dividen yang bersumber selain dari bentuk usaha koperasi. Sementara, teknis terkait penghapusan SHU Koperasi tidak diatur sama sekali dalam ketentuan pelaksana ini. Penulis berpandangan bahwa seharusnya dalam PMK tersebut terdapat penegasan-penegasan normatif yang menyatakan bahwa Pajak SHU Koperasi dikecualikan sepenuhnya tanpa syarat apapun serta terdapat penjelasan teknis lanjutan yang menerangkan bahwa pada pokoknya wajib pajak anggota koperasi tetap diharuskan melaporkan SHU yang diperoleh dalam SPT Tahunan pada kolom penghasilan tidak kena pajak. Tidak adanya penegasan serta muatan teknis normatif dalam PMK No. 18/PMK.03/2021 ini, sejatinya mencerminkan bahwa PMK ini tidak menjunjung tinggi asas materil terkait keseimbangan, keserasian dan keselarasan

V.2 Saran

Berdasarkan kajian penelitian dari tiap bab serta kesimpulan-kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini mencakup Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) untuk bersinergi melakukan sosialisasi intensif baik luring maupun daring yang secara khusus membahas Kebijakan Penghapusan Pajak Ganda SHU kepada pelaku usaha koperasi maupun masyarakat luas.
2. Pemerintah harus melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2021 dalam rangka menjunjung konsistensi norma serta asas materil terkait asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan mencantumkan penegasan yang normatif bahwa Pajak SHU Koperasi dikecualikan tanpa syarat apapun serta terdapat penjelasan teknis yang memuat bahwa wajib pajak anggota koperasi tetap diharuskan melaporkan SHU yang diperoleh dalam SPT Tahunan pada kolom penghasilan tidak kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, E-Book (Jurnal/Skripsi/Tesis)

- B. Bawono Kristiaji dan Awwaliatul Mukarromah. 2020. *Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia*. ddtc.co.id, https://ddtc.co.id/id/riset/publikasi/working-paper/meninjau-konsep-dan-relevansi-pph-final-di-indonesia/#.Xq_crqgzZPY.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya. 2020. *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional.
- Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristaji. 2020. *Desain Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan Atas Konsep Dasar dan Pengalaman Internasional*. Jakarta: PT. Dimensi Internasional.
- Dewa Gede Atmadja. *Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. 2018.
- Dedi Junaedi dan Faisal Salista. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Terdampar*. jurnal.bppk.kemenkeu.go.id, <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600/323>.
- Hugh J. Ault, Brian J. Arnold dan Graeme S. Cooper. 2020. *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis Fourth Edition*. Amsterdam: Kluwer Law International B.V.
- Harris, Peter A. 1996. *Corporate Shareholder Income Taxation Allocating Taxing Rights Between Countries*. Amsterdam: IBFD Publication.
- Hasanuddin Hasim. 2017. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ve>

[d=2ahUKEwjNxp2u8WAAxWH8DgGHTrqBc0QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.umpar.ac.id%2Findex.php%2Fmalrev%2Farticle%2Fdownload%2F32%2F34&usg=AOvVaw3inmcd0h11uBbhGZOPt1wP&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNxp2u8WAAxWH8DgGHTrqBc0QFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.umpar.ac.id%2Findex.php%2Fmalrev%2Farticle%2Fdownload%2F32%2F34&usg=AOvVaw3inmcd0h11uBbhGZOPt1wP&opi=89978449).

Isnawati. *Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang No.*

12 Tahun 2011 di Indonesia Saat Ini. jurnal.pancabudi.ac.id,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNz4L159qAAxXuzTgGHcrzCysQFnoECCEQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.pancabudi.ac.id%2Findex.php%2Fhukumresponsif%2Farticle%2Fdownload%2F733%2F693%2F&usg=AOvVaw14D2YOIcJ_v-vQ6v3840hm&opi=89978449.

Made Sudarma dan I Nyoman Darmayasa. 2021. *Historisasi Filosofis Konsep Pemajakan Dividen Pada Undang-undang Cipta Kerja.* jurnal.ub.ac.id, <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1543-6960-1-PB.pdf>.

Najmuddin dan Faisal Amri. 2016. *Komparasi Obligasi dan Sukuk Sebagai Tinjauan*

Fenomenologis. jurnal.uinbanten.ac.id, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEj5Cy1r2BAxVUwjgGHdhACn84ChAWegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fjurnal.uinbanten.ac.id%2Findex.php%2Ftsarwah%2Farticle%2Fdownload%2F134%2F136%2F410&usg=AOvVaw07-xNpKdltiviicFbF2zmu&opi=89978449>.

Ni'matul Huda. 2016. *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan*

Perundang-undangan. journal.uui.ac.id,
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW9KugucWAAxWRoWMGHVRvB80QFnoECBMOAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FIUSTUM%2Farticle%2Fview%2F4722&usg=AOvVaw260ZJkiacZCwdMZHSpDTff&opi=89978449>.

R. Tony Prayogo. 2016. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam PERMA No. 1 Tahun*

2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia Jakarta: Salemba Empat*

Widayati. 2020. *Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan*. neliti.com,
<https://www.neliti.com/id/publications/457173/implementasi-asas-hukum-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-yang-part>.

Yasin Zaidun dan Johny Wahyuadi Mudaryoto. 2010. *Analisa Perbandingan Metode Assesment Berbasis Resiko dengan Metode Assesment Berbasis Waktu*.
lib.ui.ac.id,
<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/132639-T%2027844-Analisa%20perbandingan-Tinjauan%20literatur.pdf>.

Artikel/Berita Elektronik

Aspek Pajak Penurunan Modal. thinktax.id, <https://www.thinktax.id/tax-flash/aspek-pajak-penurunan-modal>

Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional, indonesia.go.id,
<https://indonesia.go.id/kategori/feature/2991/koperasi-sokoguru-ekonomi-nasional?lang=1>

Manajemen Koperasi dan UKM: Perkembangan Koperasi di Negara-negara Berkembang.
lms- paralel.esaunggul.ac.id, https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F94758%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2FMODUL%20KULIAH%20ONLINE%2012-MNJ%20KOPERASI%20DAN%20UKM.pdf.

Mendorong Kontribusi Koperasi. indonesia.go.id, 24 Juli 2022, diakses pada 16 September 2023, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5542/mendorong-kontribusi-koperasi?lang=1>.

Mengenal UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. pajak.go.id,

<https://pajak.go.id/id/klaster-kemudahan-berusaha-bidang-perpajakan>.

Pengaruh Covid-19 atas Kondisi Sosial Ekonomi Global 2020. pen.kemenkeu.go.id,
<https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/sosialekonomiglobal>.

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia,” feb.unmul.ac.id,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC7NHik9mAAxV5cmwGHahQAQkQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.feb.unmul.ac.id%2Findex.php%2FJIEM%2Farticle%2Fview%2F1013&usg=AOvVaw0Y8F-TB7tSp2_w3xXxArD&opi=89978449.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/RP_RKP/Dokumen%20RPJMN%202020-2024/Lampiran%201.%20Narasi%20RPJMN%202020-2024.pdf.

Darussalam. *Antara Pemajakan Global dan Schedular, Pilih Mana?.* news.ddtc.co.id,
<https://perpajakan-id.ddtc.co.id/data-informasi/glosarium/search/schedular>.

Irene Radius Saretta. *Saham Bonus: Pengertian, Perbedaannya dengan Dividen dan Contoh.* cermati.com, <https://www.cermati.com/artikel/saham-bonus>.

Leana Dhia Pratiwi. *Manajemen Pajak Saat Penutupan Usaha.* accounting.binus.ac.id,
<https://accounting.binus.ac.id/2021/12/08/21949/>.

Melki Pangaribuan. *Pajak Berganda Dinilai Lemahkan Koperasi.* satuharapan.com,
<https://www.satuharapan.com/read-detail/read/pajak-berganda-dinilai-lemahkan-koperasi>.

N. Nuriman Jayabuana. *Pajak Berganda Tahan Laju Pertumbuhan Koperasi,”* ekonomi.bisnis.com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170715/87/671760/pajak-berganda-tahan-laju-pertumbuhan-koperasi>.

Ni Kadek Rory A dan Ni Luh Putu W. *Reaksi Pasar Terhadap Peristiwa Stock Dividend Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. media.neliti.com, <https://media.neliti.com/media/publications/255201-none-fb493ea5.pdf>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 12 Tahun 1959 tentang Pajak Dividen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonasi Pajak Dividen 1959

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 Jo Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.03/2009 tentang Penyampaian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. WAWANCARA DENGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



B. WAWANCARA DENGAN DIREKTORAT JENDRAL PERPAJAKAN

